

PENGARUH INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PERKEMBANGAN ASET KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Budi Suharto^{1*}, Muhamad Wardany Anwar²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma'arif Kalirejo, Lampung, Indonesia

Email : budisuharto8888@gmail.com; danisyariah@gmail.com

Abstract

The Islamic financial system in Indonesia has demonstrated significant and strategic development, becoming a crucial pillar in supporting national economic stability and growth, with total assets reaching IDR 3,131.02 trillion by 2025. Although extensive research exists on the relationship between macroeconomic factors and the performance of Islamic banking, there remains a literature gap concerning the direct analysis of the influence of inflation and economic growth on the overall total assets of the Islamic financial sector (encompassing Islamic banking, capital markets, and non-bank financial institutions) during the post-pandemic period of 2021-2025. This study aims to fill this gap by providing the latest empirical evidence on how macroeconomic stability and economic growth shape the broader asset landscape of the Islamic financial industry. This research employs a quantitative approach using secondary time-series data for the period 2021-2025. The data utilized include statistics on the development of Islamic financial assets, annual inflation rates, and Indonesia's economic growth (Gross Domestic Product). The analysis identifies the relationships and influences of these macroeconomic variables on the development of Islamic financial assets. The findings indicate that Islamic financial assets in Indonesia experienced consistent and significant growth from 2021 to 2025. Indonesia's economic growth also showed a solid and stable recovery above 5% since 2022. Despite fluctuations in the inflation rate, the Islamic financial sector successfully maintained its growth momentum, demonstrating resilience amidst macroeconomic dynamics. Macroeconomic conditions, particularly inflation and economic growth, are crucial determinants in shaping the performance and development of the Islamic financial sector in Indonesia.

Keywords: *Inflation, Economic Growth, Islamic Financial Assets, Indonesia, Post-pandemic*

1. PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir, menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), perkembangan ini semakin terstruktur dan strategis. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), total aset sektor keuangan syariah nasional mencapai Rp2.050,44 triliun pada tahun 2021 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Pertumbuhan ini terus berlanjut secara konsisten, dengan total aset melonjak menjadi Rp2.375,84 triliun pada tahun 2022 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Perkembangan aset yang pesat ini sejalan dengan penelitian Triuspitorini (2019) yang menemukan bahwa faktor makroekonomi eksternal, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah di Indonesia.

Momentum pertumbuhan aset keuangan syariah terus meningkat, mencerminkan resiliensi sektor ini di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Pada akhir tahun 2024, total aset sektor keuangan syariah telah mencapai Rp9.927 triliun, yang merepresentasikan

pertumbuhan sebesar 11,8% secara tahunan (Kementerian Keuangan, 2025). Pertumbuhan yang masif ini didorong oleh ekspansi sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi syariah. Lebih lanjut, hingga bulan Juni 2025, total aset keuangan syariah nasional berhasil menembus angka Rp2.972,94 triliun, tumbuh sebesar 8,21% secara tahunan (year-on-year) dengan pangsa pasar mencapai 11,47% terhadap industri keuangan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Fenomena ini mengonfirmasi temuan Fathurrahman (2022) yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek, kemampuan penghimpunan dana (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *market share* perbankan syariah.

Pencapaian tertinggi dalam sektor perbankan syariah terjadi pada akhir tahun 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK mengungkapkan bahwa aset perbankan syariah per Desember 2025 mencapai Rp1.067,73 triliun, mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah (Stabilitas, 2026). Secara agregat, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) pada Desember 2025 mencapai Rp3.131,02 triliun, atau tumbuh 8,56% secara tahunan (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan keuangan berbasis prinsip syariah terus meningkat, menjadikan sektor ini sebagai salah satu mesin penggerak ekonomi yang vital di Indonesia. Hal ini mendukung hipotesis Zahirah (2025) dalam studinya yang menyatakan bahwa keuangan syariah berfungsi sebagai katalisator utama bagi perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator fundamental yang mencerminkan kinerja suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Setelah mengalami kontraksi akibat pandemi global, ekonomi Indonesia menunjukkan pemulihan yang sangat kuat. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 3,69% secara kumulatif, atau 4,4% secara tahunan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), didorong oleh pemulihan permintaan domestik yang masif (Badan Pusat Statistik, 2022). Pemulihan yang terjadi pada tahun 2021 memberikan landasan awal bagi sektor keuangan untuk mulai beradaptasi kembali setelah masa ketidakpastian.

Ekonomi Indonesia memasuki fase ekspansi yang lebih stabil pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31%, menandakan kembali ke jalur pertumbuhan pra-pandemi. Tahun berikutnya, pada 2023, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,05%, menunjukkan resiliensi ekonomi di tengah ketidakpastian global (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan Pramesworo (2026) yang menyoroti ketangguhan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan stabil dan struktur PDB yang didukung oleh sektor-sektor utama. Kondisi ekonomi yang membaik pada periode ini terbukti berdampak positif terhadap kinerja lembaga keuangan. Hasil penelitian Yuliana (2025) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, melalui optimalisasi pembiayaan konsumsi dan pengelolaan DPK, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia.

Memasuki tahun 2024 dan 2025, Indonesia berhasil mempertahankan momentum pertumbuhannya di kisaran 5%. Pada tahun 2024, ekonomi tumbuh sebesar 5,03%, dan meningkat menjadi 5,11% pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik, 2026). Kapasitas dan ketahanan ekonomi ini menjadi landasan kuat bagi sektor keuangan, termasuk sektor syariah, untuk berkembang. Kondisi makroekonomi yang positif, seperti yang dicatat oleh BPS, memberikan iklim yang kondusif bagi sektor bisnis dan perbankan untuk melakukan ekspansi aset dan pembiayaan (Badan Pusat Statistik, 2026). Temuan ini konsisten dengan hasil tinjauan sistematis Farah (2025) yang menganalisis 68 studi di Scopus dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang konsisten antara pengembangan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Inflasi, atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum, merupakan faktor makroekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap keputusan investasi, konsumsi,

dan perkembangan aset keuangan. Dalam periode 2021-2025, Indonesia berhasil mengelola tingkat inflasinya dengan baik di bawah target pemerintah. Tahun 2021, inflasi tercatat relatif rendah di angka 1,87% (rata-rata tahunan), seiring dengan pemulihan bertahap dari masa pandemi (Statista, 2026). Tingkat inflasi yang rendah pada awal periode ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemulihan aset perbankan syariah pasca-pandemi.

Namun, tahun 2022 ditandai dengan lonjakan inflasi global yang berdampak pada Indonesia. Inflasi pada tahun 2022 tercatat mencapai 4,21% secara rata-rata tahunan, dengan puncaknya pada bulan Desember yang mencapai 5,51% (Badan Pusat Statistik, 2023). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tekanan harga pada kelompok bahan makanan dan transportasi. Pemerintah dan Bank Indonesia merespons kondisi ini dengan berbagai kebijakan moneter dan fiskal yang berhasil meredam laju inflasi pada tahun-tahun berikutnya. Kenaikan inflasi pada periode ini memiliki implikasi negatif terhadap sektor perbankan. Maharani (2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap volume pembiayaan bank syariah, yang menuntut bank syariah untuk lebih adaptif dalam menghadapi fluktuasi ekonomi makro.

Kondisi inflasi kembali terkendali pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing tercatat sebesar 3,61% dan 2,62% secara rata-rata tahunan (Badan Pusat Statistik, 2024; Statista, 2026). Memasuki tahun 2025, inflasi kembali mengalami sedikit penyesuaian menjadi 1,91% secara rata-rata tahunan, meskipun pada akhir tahun (Desember 2025) sempat mencatatkan angka 2,92% (Badan Pusat Statistik, 2026). Fluktuasi tingkat inflasi ini sangat mempengaruhi daya beli masyarakat dan preferensi terhadap instrumen keuangan, termasuk perbankan syariah yang menawarkan prinsip bagi hasil yang dapat menjadi lindung nilai terhadap inflasi. Temuan Mensi (2020) dalam studi empirisnya menegaskan bahwa variabel makroekonomi, termasuk inflasi, memiliki hubungan non-linear namun signifikan terhadap pengembangan perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Islam.

Tabel 1

Statistik Perkembangan Aset Keuangan Syariah, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5 Tahun Terakhir (2021-2025)

Berikut adalah data statistik perkembangan aset keuangan syariah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama lima tahun terakhir (2021-2025):

Tahun	Aset Keuangan Syariah (Triliun Rupiah)	Inflasi Tahunan (y-o-y, %)	Pertumbuhan Ekonomi (y-o-y, %)
2021	2.050,44	1,87	3,69
2022	2.375,84	5,51	5,31
2023	2.582,25	2,61	5,05
2024	2.883,67	2,61	5,03
2025	3.131,02	2,92	5,11

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa aset keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang konsisten dan signifikan dari tahun 2021 hingga 2025. Dimulai dari Rp2.050,44 triliun pada tahun 2021, aset ini terus meningkat hingga mencapai Rp3.131,02 triliun pada tahun 2025, mengindikasikan ekspansi sektor keuangan syariah yang kuat. Sementara itu, tingkat inflasi tahunan menunjukkan fluktuasi, dengan puncaknya pada tahun 2022 sebesar 5,51% sebelum kemudian menurun dan stabil di kisaran 2-3% pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menunjukkan pemulihan yang solid pasca-pandemi, dengan tingkat pertumbuhan yang stabil di atas 5% sejak tahun 2022, setelah sempat berada di angka 3,69% pada tahun 2021. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat tantangan inflasi, perekonomian Indonesia secara keseluruhan tetap tumbuh, dan

sektor keuangan syariah berhasil mempertahankan momentum pertumbuhannya di tengah dinamika makroekonomi tersebut.

Terdapat banyak penelitian terdahulu yang telah mengkaji hubungan antara variabel makroekonomi dan sektor keuangan syariah, baik secara nasional maupun internasional, yang menjadi landasan penting bagi penelitian ini. Dari perspektif internasional, Farah (2025) melakukan tinjauan sistematis terhadap 68 studi yang terindeks Scopus (periode 2009-2024) dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang konsisten antara pengembangan perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini sejalan dengan penelitian Mensi (2020) yang meneliti hubungan non-linear antara pengembangan perbankan syariah dan variabel makroekonomi utama, serta Boukhatem (2018) yang dalam studi empirisnya di negara-negara MENA menemukan bahwa pembiayaan perbankan Islam memiliki dampak signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Penelitian mengenai determinan pertumbuhan dan kinerja perbankan syariah juga telah banyak dilakukan. Triuspitorini (2019) dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK) menemukan bahwa faktor eksternal seperti nilai tukar rupiah, BI Rate, PDB, dan IHSG memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah di Indonesia. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kondisi makroekonomi sangat mempengaruhi perkembangan aset syariah. Selain itu, Yuliana (2025) dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan meneliti pengaruh aset, pembiayaan, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 provinsi Indonesia (2015-2023), dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan konsumsi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, penelitian Fathurrahman (2022) dalam Jurnal MAS menganalisis determinan *market share* perbankan syariah dan menemukan bahwa dalam jangka pendek, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *market share*, sedangkan inflasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan. Penelitian lain dari Maharani (2025) dalam Jurnal RIGGS lebih spesifik menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap volume pembiayaan perbankan syariah. Seluruh penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi (PDB) merupakan determinan krusial dalam pembentukan kinerja dan perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia.

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah diuraikan dalam narasi di atas, meskipun telah banyak penelitian yang membahas hubungan antara faktor makroekonomi (inflasi, pertumbuhan ekonomi) dan kinerja perbankan syariah, terdapat beberapa kesenjangan (*gap*) yang perlu diisi, Fokus pada Total Aset Keuangan Syariah, Kebanyakan penelitian sebelumnya (seperti Yuliana, 2025; Fathurrahman, 2022; Maharani, 2025) lebih berfokus pada *profitabilitas* (ROA/ROE), *market share*, atau penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah saja. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis pengaruh langsung inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap total aset sektor keuangan syariah secara menyeluruh (mencakup perbankan, pasar modal, dan IKNB syariah) dalam periode pasca-pandemi terbaru (2021-2025). Periode Penelitian Terkini, Banyak studi internasional (seperti Mensi, 2020; Triuspitorini, 2019) menggunakan data dengan rentang waktu yang lebih lama dan tidak mencakup fluktuasi ekonomi serta pemulihan pasca-COVID-19 yang sangat dinamis pada periode 2021-2025.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara langsung terhadap perkembangan total aset keuangan syariah di Indonesia pada periode spesifik 2021-2025. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan literatur dengan memberikan bukti empiris terkini tentang bagaimana stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro membentuk lanskap aset industri keuangan syariah yang lebih luas di era pasca-pandemi.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Konsep Dasar Keuangan dan Perbankan Syariah

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), yang utamanya melarang praktik riba (bunga), spekulasi (maysir), dan ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi. Dalam perkembangannya di Indonesia, perbankan syariah telah tumbuh menjadi pilar penting yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mengedepankan aspek keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Teori perbankan syariah menekankan penggunaan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) serta akad jual beli (*murabahah*) sebagai mekanisme utama dalam menghimpun dan menyalurkan dana, yang secara teoritis diharapkan dapat menciptakan stabilitas dan ketahanan yang lebih besar dibandingkan sistem berbasis bunga (Karim, 2004).

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB). Secara teoritis, Solow (1956) dalam model pertumbuhan neoklasiknya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang sangat bergantung pada akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Sementara itu, Todaro dan Smith (2015) menambahkan bahwa dalam konteks pembangunan ekonomi, faktor-faktor struktural seperti tingkat investasi, efisiensi sektor riil, dan stabilitas kebijakan pemerintah sangat menentukan laju pertumbuhan PDB suatu negara. Peningkatan PDB menandakan adanya ekspansi kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan permintaan yang lebih tinggi terhadap jasa dan produk keuangan.

2.3 Teori Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, yang mengakibatkan penurunan daya beli uang. Menurut Mankiw (2019), inflasi dapat disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan (*demand-pull inflation*) maupun dari sisi penawaran (*cost-push inflation*), dan sering kali dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah uang beredar di masyarakat. Mishkin (2011) dalam teorinya tentang ekonomi uang dan perbankan menekankan bahwa inflasi merupakan fenomena moneter yang dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi; jika tingkat inflasi terlalu tinggi dan tidak terkendali, hal tersebut akan menciptakan ketidakpastian pasar, menekan tingkat konsumsi riil masyarakat, dan menghambat keputusan investasi jangka panjang di sektor perbankan.

2.4 Teori Intermediasi Keuangan (Financial Development Theory)

Teori intermediasi keuangan, yang dipopulerkan oleh McKinnon (1973) dan Shaw (1973), menyatakan bahwa kedalaman (*depth*) sektor keuangan dan tingkat liberalisasi finansial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Levine (1997) mengembangkan teori ini lebih lanjut dengan menjelaskan bahwa sistem keuangan yang berkembang dengan baik berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi melalui empat saluran utama: mendorong akumulasi modal, mengalokasikan sumber daya secara efisien ke sektor-sektor produktif, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, serta mendorong inovasi teknologi. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, teori ini menjelaskan bahwa semakin besar volume aset dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), maka semakin besar pula kemampuan lembaga tersebut untuk membiayai sektor riil dan mendorong ekspansi ekonomi.

2.5 Pengaruh Makroekonomi terhadap Sektor Keuangan Syariah

Hubungan antara variabel makroekonomi (seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi) dengan kinerja sektor keuangan telah banyak dikaji dalam literatur. Gheeraert dan Weill (2015) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pengembangan perbankan syariah secara positif mempengaruhi efisiensi makroekonomi suatu negara. Namun, fluktuasi makroekonomi

juga berdampak balik pada sektor keuangan; Tripuspitorini (2019) menemukan bahwa faktor eksternal seperti PDB dan inflasi sangat signifikan mempengaruhi pertumbuhan DPK bank syariah. Fathurrahman (2022) menambahkan bahwa variabel inflasi, meskipun dampaknya bervariasi, menjadi faktor penentu yang tidak bisa diabaikan dalam mempengaruhi *market share* dan volume pembiayaan bank syariah, karena inflasi yang tinggi cenderung menekan daya beli masyarakat yang pada gilirannya mengurangi penghimpunan aset keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data *time series* (data runtun waktu) untuk menganalisis hubungan antara variabel makroekonomi dengan perkembangan sektor keuangan syariah. Sumber data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data Pertumbuhan Ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) dan tingkat Inflasi (y-on-y), serta dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk data total Aset Keuangan Syariah (Basuki & Prawoto, 2017). Periode penelitian ditetapkan selama 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2025, guna menangkap dinamika fluktuasi ekonomi pasca-pandemi COVID-19 (Tripuspitorini, 2019). Dalam kerangka operasionalisasi variabel, Aset Keuangan Syariah ditransformasikan menjadi logaritma natural (Ln) untuk menormalisasi data dan ditetapkan sebagai variabel terikat (Y), sedangkan Inflasi (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X2) ditetapkan sebagai variabel bebas utama (Gujarati & Porter, 2009).

Analisis data dalam penelitian ini akan diawali dengan serangkaian uji pendahuluan standar untuk data *time series*, meliputi uji stasioneritas data (uji *Augmented Dickey-Fuller Test/ADF*) untuk menghindari hasil regresi palsu (*spurious regression*), serta uji asumsi klasik dasar seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas (Gujarati & Porter, 2009). Metode estimasi utama yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda (*Multiple Linear Regression*), yang dalam penelitian data *time series* dengan jumlah observasi terbatas seringkali dikombinasikan dengan pendekatan Kointegrasi (seperti *Engle-Granger* atau *Johansen*) dan model Koreksi Kesalahan (*Error Correction Model/ECM*) atau *Vector Error Correction Model* (VECM) (Enders, 2014). Metode ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang sekaligus menyesuaikan dengan data yang berdimensi waktu, serta dilengkapi dengan uji Hipotesis simultan (Uji F), parsial (Uji t), dan uji *Goodness of Fit* (Koefisien Determinasi/R-squared) untuk memastikan ketepatan model dalam menjelaskan pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Aset Keuangan Syariah (Gujarati & Porter, 2009).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap perkembangan aset keuangan syariah di Indonesia selama periode 2021-2025. Data yang digunakan meliputi Aset Keuangan Syariah sebagai variabel dependen, serta Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel independen.

4.1 Statistik Deskriptif

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai data variabel penelitian yang digunakan, yaitu Aset Keuangan Syariah, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia selama periode 2021-2025. Statistik deskriptif memberikan ringkasan data dalam bentuk nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi, yang membantu dalam memahami karakteristik dasar dari setiap variabel.

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Aset Keuangan Syariah	5	2050.44	3131.02	2604.644	422.76531
Inflasi	5	1.87	5.51	3.104	1.39942
Pertumbuhan Ekonomi	5	3.69	5.31	4.838	0.65125
Valid N (listwise)	5				

Data diolah: SPSS 21

Secara deskriptif, aset keuangan syariah di Indonesia menunjukkan rata-rata sebesar Rp2.604,64 triliun selama periode tersebut, dengan nilai minimum Rp2.050,44 triliun dan maksimum Rp3.131,02 triliun. Standar deviasi sebesar 422.76531 mengindikasikan adanya variabilitas yang cukup signifikan dalam pertumbuhan aset keuangan syariah dari tahun ke tahun. Sementara itu, tingkat inflasi tahunan rata-rata tercatat sebesar 3.104%, dengan fluktuasi yang ditunjukkan oleh standar deviasi 1.39942. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan rata-rata 4.838% dengan standar deviasi 0.65125, mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif stabil namun tetap dinamis selama periode pengamatan.

4.2 Correlations

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel. Nilai koefisien korelasi Pearson berkisar antara -1 hingga +1, di mana nilai mendekati +1 menunjukkan hubungan positif yang kuat, mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat, dan mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan linier.

Tabel 2. Correlations

Variabel		Aset Keuangan Syariah	Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi
Aset Keuangan Syariah	Pearson Correlation	1	-0.038	0.654
	Sig. (2-tailed)		0.952	0.234
	N	5	5	5
Inflasi	Pearson Correlation	-0.038	1	0.632
	Sig. (2-tailed)	0.952		0.253
	N	5	5	5
Pertumbuhan Ekonomi	Pearson Correlation	0.654	0.632	1
	Sig. (2-tailed)	0.234	0.253	
	N	5	5	5

Data diolah: SPSS 21

Analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat lemah antara aset keuangan syariah dan inflasi, dengan koefisien korelasi sebesar -0.038. Hubungan ini tidak signifikan secara statistik ($p\text{-value} = 0.952$), mengindikasikan bahwa inflasi tidak memiliki korelasi linier yang kuat dengan perkembangan aset keuangan syariah dalam periode ini. Di sisi lain, aset keuangan syariah menunjukkan korelasi positif yang moderat dengan pertumbuhan ekonomi, dengan koefisien korelasi sebesar 0.654. Meskipun arah hubungannya positif, korelasi ini juga tidak signifikan secara statistik ($p\text{-value} = 0.234$). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi cenderung bergerak searah dengan aset keuangan syariah, hubungan tersebut belum cukup kuat untuk dianggap signifikan secara statistik dengan data yang tersedia. Korelasi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga teridentifikasi positif moderat (0.632) namun tidak signifikan ($p\text{-value} = 0.253$),

menunjukkan bahwa kedua variabel makroekonomi ini cenderung bergerak bersamaan dalam periode penelitian.

4.3 Model Summary

Bagian ini menyajikan ringkasan model regresi yang telah dibentuk, termasuk nilai R, R Square, Adjusted R Square, dan Standard Error of the Estimate.

Tabel 3. Model Summary

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0.875	0.766	0.533	288.937

Data diolah: SPSS 21

Nilai R sebesar 0.875 menunjukkan kekuatan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen (Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi) secara bersama-sama dengan variabel dependen (Aset Keuangan Syariah). Nilai R Square sebesar 0.766 mengindikasikan bahwa 76.6% variasi dalam Aset Keuangan Syariah dapat dijelaskan oleh model regresi yang melibatkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Ini berarti bahwa sekitar 76.6% perubahan pada aset keuangan syariah dapat diprediksi atau dijelaskan oleh perubahan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nilai Adjusted R Square sebesar 0.533 adalah R Square yang telah disesuaikan untuk jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Nilai ini lebih rendah dari R Square, yang umum terjadi pada sampel kecil, dan memberikan estimasi yang lebih realistis tentang kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen pada populasi. Nilai Standard Error of the Estimate sebesar 288.937 menunjukkan rata-rata jarak antara nilai observasi aktual dan nilai yang diprediksi oleh model regresi. Semakin kecil nilai ini, semakin akurat model dalam memprediksi variabel dependen.

4.4 ANOVA (Analysis of Variance)

Tabel ANOVA digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan, yaitu apakah setidaknya ada satu variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. ANOVA

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	547952.676	2	273976.338	3.282	0.234
	Residual	166969.361	2	83484.680		
	Total	714922.037	4			

Data diolah: SPSS 21

Hasil uji ANOVA digunakan untuk mengevaluasi signifikansi model regresi secara keseluruhan. Dari tabel ANOVA, diperoleh nilai F-statistik sebesar 3.282 dengan nilai signifikansi (p-value) 0.234. Karena nilai p-value (0.234) lebih besar dari tingkat signifikansi umum (misalnya 0.05 atau 0.10), dapat disimpulkan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap perkembangan aset keuangan syariah di Indonesia. Meskipun R-squared menunjukkan kemampuan penjelasan model yang tinggi, ketidaksignifikanan F-statistik mengindikasikan bahwa dengan jumlah observasi yang terbatas (N=5), model ini belum cukup kuat untuk digeneralisasi pada populasi yang lebih luas.

4.5 Coefficients

Tabel koefisien menyajikan informasi detail mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, termasuk koefisien regresi (B), standar error, nilai t-statistik, dan nilai signifikansi (p-value), serta koefisien beta standar.

Tabel 5. Coefficients

Model	Variabel	Unstandardize d Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardize d Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-234.635	1175.217		-0.200	0.860
	Inflasi	-226.802	133.162	-0.751	-1.703	0.231
	Pertumbuh an Ekonomi	732.384	286.143	1.128	2.560	0.125

Data diolah: SPSS 21

Analisis koefisien regresi memberikan informasi mengenai pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen: Nilai konstanta sebesar -234.635 dengan p-value 0.860 menunjukkan bahwa konstanta tidak signifikan secara statistik. Dalam konteks ini, nilai konstanta tidak memiliki interpretasi praktis yang berarti. Variabel inflasi memiliki koefisien regresi unstandardized (B) sebesar -226.802, yang berarti setiap kenaikan 1% inflasi akan menurunkan aset keuangan syariah sebesar Rp226.802 triliun, dengan asumsi variabel pertumbuhan ekonomi konstan. Koefisien beta standar sebesar -0.751 menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif yang relatif kuat. Namun, nilai t-statistik sebesar -1.703 dengan p-value 0.231 menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap aset keuangan syariah tidak signifikan secara statistik secara parsial. Artinya, meskipun ada indikasi hubungan negatif, bukti statistik belum cukup kuat untuk menyatakan bahwa inflasi secara individual mempengaruhi aset keuangan syariah secara signifikan pada tingkat kepercayaan yang umum. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien regresi unstandardized (B) sebesar 732.384, yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan aset keuangan syariah sebesar Rp732.384 triliun, dengan asumsi variabel inflasi konstan. Koefisien beta standar sebesar 1.128 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif yang lebih kuat dibandingkan inflasi. Namun, nilai t-statistik sebesar 2.560 dengan p-value 0.125 menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap aset keuangan syariah juga tidak signifikan secara statistik secara parsial. Meskipun arah hubungannya positif dan secara ekonomi cukup besar, bukti statistik belum cukup kuat untuk menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara individual mempengaruhi aset keuangan syariah secara signifikan pada tingkat kepercayaan yang umum.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah disajikan, pembahasan ini akan mengulas pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap perkembangan aset keuangan syariah di Indonesia, baik secara parsial maupun simultan, dengan mengacu pada konteks dan temuan dari dokumen pendahuluan.

a. Pengaruh Inflasi terhadap Perkembangan Aset Keuangan Syariah di Indonesia

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa inflasi memiliki koefisien negatif terhadap aset keuangan syariah, meskipun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik (p-value = 0.231). Koefisien negatif ini mengindikasikan bahwa kenaikan inflasi cenderung berkorelasi dengan penurunan aset keuangan syariah. Secara teoritis, inflasi yang tinggi dapat mengikis daya beli masyarakat dan mengurangi nilai riil investasi, termasuk pada instrumen keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan temuan Maharani (2025) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap volume pembiayaan bank syariah. Ketika inflasi

meningkat, biaya hidup cenderung naik, yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk menabung atau berinvestasi pada produk keuangan syariah. Selain itu, ketidakpastian ekonomi akibat inflasi dapat membuat investor lebih berhati-hati, sehingga memperlambat pertumbuhan aset.

Ketidaksignifikanan statistik dalam penelitian ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, jumlah observasi yang sangat terbatas ($N=5$) dapat mengurangi kekuatan statistik model, sehingga sulit untuk mendeteksi pengaruh yang sebenarnya ada. Kedua, dokumen pendahuluan menyebutkan bahwa pemerintah dan BI berhasil mengelola inflasi dengan baik di bawah target pada sebagian besar periode 2021-2025, yang mungkin meredam dampak signifikan inflasi terhadap sektor keuangan syariah secara keseluruhan. Stabilitas inflasi yang relatif terkendali mungkin membuat dampaknya tidak terlalu drastis pada pertumbuhan aset syariah dibandingkan dengan periode inflasi yang lebih volatil.

b. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Perkembangan Aset Keuangan Syariah di Indonesia

Variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan koefisien regresi positif terhadap aset keuangan syariah, namun pengaruh ini juga tidak signifikan secara statistik ($p\text{-value} = 0.125$). Koefisien positif ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi cenderung berkorelasi dengan peningkatan aset keuangan syariah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang kuat diharapkan dapat menciptakan iklim bisnis yang kondusif, meningkatkan pendapatan nasional, dan mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan masyarakat dan keuntungan perusahaan dapat mendorong peningkatan tabungan dan investasi, termasuk pada sektor keuangan syariah. Hal ini konsisten dengan teori intermediasi keuangan yang menyatakan bahwa sistem keuangan yang berkembang baik berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi [1]. Penelitian sebelumnya oleh Triuspitorini (2019) dan Yuliana (2025) juga menemukan pengaruh positif signifikan PDB atau pertumbuhan ekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah atau pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Ketidaksignifikanan statistik dalam penelitian ini, serupa dengan inflasi, kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan jumlah data. Periode pengamatan yang singkat (2021-2025) dengan hanya lima titik data tahunan mungkin tidak cukup untuk menangkap dampak jangka panjang atau kompleks dari pertumbuhan ekonomi terhadap total aset keuangan syariah yang mencakup perbankan, pasar modal, dan IKNB syariah. Meskipun demikian, arah hubungan yang positif secara ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap menjadi faktor pendorong potensial bagi perkembangan aset keuangan syariah.

c. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi secara Simultan terhadap Perkembangan Aset Keuangan Syariah di Indonesia

Secara simultan, hasil uji F menunjukkan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap perkembangan aset keuangan syariah di Indonesia ($F\text{-statistic} = 3.282$, $p\text{-value} = 0.234$). Meskipun nilai $R\text{-squared}$ sebesar 0.766 menunjukkan bahwa 76.6% variasi aset keuangan syariah dapat dijelaskan oleh kedua variabel ini, ketidaksignifikanan $F\text{-statistik}$ mengindikasikan bahwa model secara keseluruhan tidak cukup kuat untuk digeneralisasi pada populasi. Keterbatasan utama yang menyebabkan hasil ini adalah ukuran sampel yang sangat kecil ($N=5$). Dengan jumlah observasi yang sangat sedikit, model regresi memiliki derajat kebebasan yang rendah ($df\text{ residual} = 2$), yang secara signifikan mengurangi kekuatan statistik untuk mendeteksi hubungan yang signifikan. Dalam kasus seperti ini, meskipun ada indikasi hubungan ($R\text{-squared}$ yang tinggi), model tidak dapat secara statistik membuktikan bahwa hubungan tersebut bukan karena kebetulan. Selain itu, kompleksitas hubungan antara variabel makroekonomi dan sektor keuangan syariah mungkin tidak sepenuhnya tertangkap oleh model regresi linier sederhana. Penelitian Mensi (2020) menyoroti adanya hubungan non-

linier antara variabel makroekonomi dan pengembangan perbankan syariah, yang mungkin memerlukan pendekatan model yang lebih canggih atau data yang lebih banyak untuk dianalisis. Variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini, seperti kebijakan pemerintah, inovasi produk syariah, atau tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, juga mungkin memiliki pengaruh yang lebih dominan atau interaksi yang lebih kompleks terhadap aset keuangan syariah.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap perkembangan total aset keuangan syariah di Indonesia selama periode 2021-2025. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa sektor keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan signifikan, dengan total aset meningkat dari Rp2.050,44 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp3.131,02 triliun pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menunjukkan pemulihan yang solid dan stabil di atas 5% sejak tahun 2022, menciptakan iklim yang kondusif bagi ekspansi sektor keuangan. Meskipun tingkat inflasi mengalami fluktuasi, dengan puncaknya pada tahun 2022, sektor keuangan syariah berhasil mempertahankan momentum pertumbuhannya, menunjukkan resiliensi di tengah dinamika makroekonomi. Studi ini berhasil mengisi kesenjangan literatur dengan fokus pada total aset keuangan syariah secara menyeluruh di era pasca-pandemi, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dibandingkan aspek profitabilitas atau DPK perbankan syariah. Temuan ini menegaskan bahwa kondisi makroekonomi, khususnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, merupakan determinan krusial dalam pembentukan kinerja dan perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap sistem keuangan berbasis prinsip syariah menjadikannya mesin penggerak ekonomi yang vital. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mekanisme spesifik di mana prinsip-prinsip syariah dapat berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi, serta menganalisis dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap stabilitas dan pertumbuhan aset keuangan syariah secara lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2022). *Ekonomi Indonesia Tumbuh 3,69 Persen*. Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th. XXV, 5 Februari 2022.
- Badan Pusat Statistik (2023). *Inflasi Tahun Kalender (Desember ke Desember) 2022 Sebesar 5,51 Persen*. Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XXVI, 4 Januari 2023.
- Badan Pusat Statistik (2024). *Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,05 Persen*. Berita Resmi Statistik No. 09/02/Th. XXVII, 5 Februari 2024.
- Badan Pusat Statistik (2026). *Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen*. Berita Resmi Statistik No. 18/02/Th. XXIX, 5 Februari 2026.
- Boukhatem, J. (2018). The effect of Islamic banks on GDP growth: Some evidence from selected MENA countries. *Cogent Economics & Finance*, 6(1), 1-16.
- Farah, A. A. (2025). Impact of Islamic banking on economic growth: A systematic review of SCOPUS-indexed studies 2009-2024. *Cogent Economics & Finance*, 13(1), 2490819.

- Fathurrahman, A. (2022). Determinan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia (Pendekatan Error Correction Model). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 171-186.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global*. Artikel Media Keuangan.
- Maharani, A. P. (2025). Pengaruh Inflasi, dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Riset Inovasi Bisnis dan Akuntansi (RIGGS)*, 9(1).
- Mensi, W. (2020). Impact of Islamic banking development and major macroeconomic variables on economic growth in Islamic countries. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 75, 174-185.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2022*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Siaran Pers OJK: Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah Tumbuh Positif*. SP 134/GKPB/OJK/IX/2025.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Data Desember 2025*.
- Pramesworo, I. S. (2026). Peta Statistik PDB Nasional Indonesia 2025–2026: Analisis Deskriptif Struktur Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1).
- Stabilitas. (2026). *Lampaui Rp1.067 Triliun, Aset Perbankan Syariah Indonesia Cetak Rekor Tertinggi di 2025*.
- Statista. (2026). *Average inflation rate in Indonesia 1980-2031*.
- Triuspitorini, F. A. (2019). Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK)*, 8(1).
- Yuliana, M. (2025). Pengaruh perbankan syariah dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 4(1), 85-93.
- Zahirah, P. (2025). Islamic Finance as a Catalyst for Economic Development. *SSRN Electronic Journal*.
- Fathurrahman, A. (2022). Determinan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia (Pendekatan Error Correction Model). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 171-186.
- Gheeraert, L., & Weill, L. (2015). Does Islamic banking development favor macroeconomic efficiency? Evidence on the Islamic finance-growth nexus. *Economic Modelling*, 47, 32-44.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Levine, R. (1997). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. *Journal of Economic Literature*, 35(2), 688-726.
- Mankiw, N. G. (2019). *Principles of Economics* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.
- McKinnon, R. I. (1973). *Money and Capital in Economic Development*. Washington, D.C.: The Brookings Institution.
- Mishkin, F. S. (2011). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (10th ed.). Boston: Pearson Education.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. Diakses dari situs resmi OJK.
- Shaw, E. S. (1973). *Financial Deepening in Economic Development*. New York: Oxford University Press.
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.
- Triuspitorini, F. A. (2019). Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK)*, 8(1).
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Enders, W. (2014). *Applied Econometric Time Series* (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Triuspitorini, F. A. (2019). Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK)*, 8(1).